BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah ketenagakerjaan adalah salah satu masalah yang rumit didalam ilmu ekonomi dan ilmu pemerintahan. Jumlah penduduk yang semakin besar akan menambah tugas dari pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya. Bagaimana pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran yang ada. Kelangkaan lapangan pekerjaan terjadi karena ketidakseimbangan antara kemampuan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penduduk usia kerja yang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Sehingga hal ini memicu bertambahnya angka pengangguran.

Menurut Harlik, faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan.[1] Sedangkan menurut Sudrajad, pengangguran dapat terjadi karena lapangan kerja yang tersedia memerlukan pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh pencari kerja. Kalaupun ada jumlahnya sangat terbatas, misalnya pengetahuan tentang komputer, bahasa inggris, bond A, bond B, dan pengetahuan aktuaria. Keadaan yang demikian menyebabkan jumlah pengangguran tetap tinggi

[1]Harlik dkk, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran*, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 2 dalam https://media.neliti.com. diakses pada 10 Februari 2019

karena tidak ada titik temu antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.[2]

Menurut Gregory, Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi, tidaklah mengejutkan pengangguran menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam masalah politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.[3]

Pengangguran selalu menjadi masalah, bukan saja karena pengangguran berarti pemborosan dana. Akan tetapi, juga memberikan dampak sosial yang tidak baik misalkan akan semakin meningkat tindakan kriminal dan pelanggaran moral. Akan tetapi disisi lain pengangguran umumnya dilakukan dengan suka rela, baik karena memilih pekerjaan, menunggu pekerjaan yang sesuai, keluar dari pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan baru karena alasan jenuh, bosan atau tidak cocok dengan pekerjaan dan perusahaan, dan berbagai macam alasan lain.[4]

Dikutip dari Tribunnews.com
Laporan Wartawan Tribun Manado Nielton Durado
TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Sepanjang tahun 2016, kasus kriminal yang terjadi di kota Manado ternyata didominasi oleh masyarakat yang berstatus pengangguran.
Data Polresta Manado catat terdapat 1046 pengangguran yang terlibat kasus sepanjang tahun 2016.

---

[2] Sudrajad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hal. 7

[3] N. Gregory Mankiw, *Makro Ekonomi*. Terjemahan : Fitria Liza, Imam Nurmawan, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 150

[4] Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik Ed.I Cet.I*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), hal. 121

"Paling banyak kasus yang mereka lakukan yakni kekerasan dengan senjata tajam. Misalkan penikaman dan pemukulan," ujar Kasubag Humas Polresta Manado AKP Rolly Sahelangi, Jumat (3/3) siang tadi.
Meski begitu angka ini mengalami penurunan dari tahun 2015.
"Kalau tahun 2015 ada 1389 tersangka yang berstatus pengangguran. Tapi tahun ini sedikit menurun," lanjut Sahelangi.
Ia juga menambahkan bahwa kebanyakan dari tersangka ini terjerumus ke dalam pergaulan seperti miras dan obat-obatan.
"Jadi paling banyak yang buat kasus itu kedapatan miras lalu pukul atau tusuk orang. Sedangkan yang lain mungkin karena terlibat perkelahian saja," tandasnya.
Di tempat terpisah, SS salah satu tersangka asal kecamatan Tuminting kota Manado mengaku pergaulannya setiap harilah yang memicu dirinya bertindak kriminal.
"Awalnya dari miras sama teman-teman, tapi lama kelamaan sudah diajak cari masalah dengan anak lorong sebelah. Karena sudah mabuk saya pun akhirnya berkelahi dengan mereka," pungkasnya.

Pekerjaan merupakan suatu yang sangat penting didalam kehidupan.Setiap manusia yang hidup membutuhkan suatu pekerjaan. Pekerjaan juga dapat diartikan sebagai sumber penghasilan yang dibutuhkan setiap masunia untuk mememenuhi kehidupan sehari-hari. Pekerjaan juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk membuktikan kemampuan yang dimiliki sehingga seseorang yang mendapat pekerjaan akan merasa hidupnya lebih berharga baik bagi dirinya sendiri maupun keluarga dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu hak atas pekerrjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Tabel 1.1
Pengangguran Terbuka Tahun 2014-2015

Uraian	2014			2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Pengangguran Terbuka (TPT)	2.07	2.87	2.42	4.03	3.83	3.95
- Pernah Bekerja	0.89	1.3	1.07	1.21	1.79	1.46
- Tidak Pernah Bekerja	1.18	1.57	1.35	2.82	2.03	2.49

Sumber : https://tulungagungkab.bps.go.id.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari[5] :

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerejaan, karena merasa tidak mungkin.
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai untuk bekerja.

Pada Tabel 1.1 telah digambarkan tentang persentase pengangguran terbuka. Jika kita lihat pada kolom Laki-laki dan kolom Perempuan, maka presentase menganggur kebanyakan adalah perempuan. Pada tabel Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2014 tingkat Presentase pada kolom L+P adalah sebesar 2,42 persen. Lalu kita lihat pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2015, tingkat presentase sebesar 3,95 persen. Jadi dapat kita

[5]Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, https://tulungagungkab.bps.go.id.

simpulkan bahwa tingkat pengangguran naik dari 2,42 persen menuju 3,95 persen.

Menurut Sudrajad, strategi dalam mengurangi pengangguran yaitu dengan cara menciptakan penghasilan sendiri, melalui pengembangan wirausaha, melalui pemerintah, dan kerja sama perusahaan besar dengan lingkungan dan usaha kecil dan menengah.[6] Jadi, disini pemerintah juga ikut andil dalam mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini tercermin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membentuk suatu badan atau dinas yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam hal pembangunan maupun sosial melalui kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas untuk mengurus masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ditujukan dalam menyediakan lapangan kerja. Sebagai implementasi dari Pasal 27 (2) dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan pembangunan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 4 UU Nomor Tahun 2003 yang berbunyi :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum dan manusiawi

[6]Sudrajad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Wirausaha,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal. 11

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, fenomena yang terjadi saat ini yaitu bahwasanya lapangan pekerjaan yang tersedia masih belum memadai, dikarenakan jumlah angkatan kerja terus meningkat melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Bukan hanya itu saja, akan tetapi juga terjadinya kesenjangan antara kompetensi dari pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja, atau bisa dikatakan terjadinya *mis-match*. Dalam mengurangi pengangguran pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki dua kebijakan yaitu kebijakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dan kebijakan penempatan dan perluasan tenaga kerja.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai program pelatihan dan *job fair* yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Jadi peneliti mengambil judul **"Program Pelatihan dan *Job Fair* dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung)"**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung dalam mengurangi jumlah pengangguran melalui program pelatihan dan *job fair* dalam perspektif ekonomi islam?
2. Bagaimana hasil pelatihan dan *job fair* dalam mengurangi jumlah pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung dalam perspektif ekonomi islam?
3. Apa saja kendala dan solusi program pelatihan dan *job fair* dalam mengurangi jumlah pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung dalam mengurangi jumlah pengangguran melalui program pelatihan dan *job fair* dalam perspektif ekonomi islam.
2. Untuk mengetahui hasil pelatihan dan *job fair* dalam mengurangi jumlah pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung dalam perspektif ekonomi islam.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi program pelatihan dan *job fair* dalam mengurangi jumlah pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung dalam mengurangi angka pengangguran melalui program pelatihan dan *job fair*. Fokus penelitian ini

adalah strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungangung dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan cara :

1. Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja

   Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat setempat dan juga menyesuaikan bakat yang dimiliki masyarakat melalui pendidikan formal, kursus, ataupun lain-lain. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah dengan optimalisasi program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana pelatihan bagi tenaga kerja. Selain itu, pembenahan sektor pendidikan di sekolah juga perlu diperhatikan. Perlu adanya kekesuaian antara pendidikan yang diajarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan di dunia kerja.

2. *Job Fair* (Bursa Kerja)

   Pemerintah dapat bekerja sama dengan swasta dengan cara menyalurkan tenaga kerja yang belum terserap di dunia kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh swasta. Adapun cara yang dapat dilakukakn oleh pemerintah ialah melalui program bursa kerja atau *job fair* sebagai wadah bagi pencari kerja dan swasta yang menjadi penerima tenaga kerja.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan berguna bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya strategi mengurangi jumlah pengangguran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan usulan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah khususnya di kabupaten Tulungagung dalam strategi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan masalah ketenagakerjaan agar tenaga kerja yang ada dapat terserap secara maksimal dan mengurangi angka pengangguran.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari suatu kesalahpahaman dalam menginterprestasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta untuk memahami pokok-pokok uraian, maka peneliti mengemukakan pengertian dari judul "Program Pelatihan dan *Job Fair* dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung)" sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

   a. Program dapat diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha (dalam bidang ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya).[7]

   b. Pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, skill, sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan.[8]

   c. *Job fair* (bursa kerja adalah bursa atau pameran bagi para majikan, perekrut, dan sekolah utuk bertemu dengan para pencari kerja yang prospektif.[9]

   d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.[10]

   e. Pengangguran adalah suatu keadaan menganggur yang tiap tahun meningkat.[11]

2. Definisi Operasional

   Program Dinas Tenaga Kerja dan dalam mengurangi jumlah pengagguran Transmigrasi melalui pelatihan dan job fair adalah perencanaan atau rencana dari suatu lembaga pemerintahan dalam

---

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.web.id/program.html. diakses pada tanggal 02 Juli 2019

[8] Sri Larasati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hal. 111

[9] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bursa_Kerja diakses pada tanggal 2 Juli 2019

[10] https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20101/dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi.html diakses pada tanggal 15 Desember 2018

[11] Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 68

mengambil suatu tindakan/kegiatan yang dapat mengurangi suatu angka pengangguran melalui pelatihan dan *job fair* (bursa kerja).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi dari keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Pada bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman pesetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Pada bagian isi penelitian ini disusun menjadi lima bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai paparan data dan temuan penelitian

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai analisis hasil temuan melalui teori penelitian terdahulu dan teori yang ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran/rekomendasi. Pada bagian akhir penelitian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penelitian.